

Pilkada Dan Hari Keluarga Nasional

Pewarta: Redaksi - 29 June, 2018



dr. Hardisman, MHID, PhD

BeritaSumbar.com, -Pilkada serentak tahun 2018 ini telah usai kita laksanakan, pada berbagai Provinsi dan Kabupaten Kota di Indonesia. Setiap warga negara yang berhak telah menyalurkan hak suaranya ada pemilihan tanggal 27 Juni 2018. Saat ini sebagai warga negara kita menunggu dengan baik keputusan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang siapa yang akan menjadi gubernur, walikota atau bupati dalam lima tahun kedepan. Sebagaimana juga yang dilaksanakan dalam pemilihan walikota di Sumbar, untuk Kota Padang, Sawahlunto, Pariaman, dan Padang Panjang.

Bagi para kandidat atau partai politik yang mengusung calon yang akan duduk dalam pimpinan daerah kedepannya, saatnya menyusun kebijakan yang berpihak kepada rakyat demi kemaslahatan bersama. Pilkada adalah sebuah pertarungan politik dalam sebuah gelanggang, bila pertandingan itu telah usai saatnya utk bekerja nyata.

Hari Keluarga Nasional yang Terluput

Hingar-bingar Pilkada yang seyogyanya merupakan cerminan semangat untuk mengabdikan pada bangsa dan negara kadang kala telah kehilangan semangat dan nilai luhurnya. Sejatinya Pilkada adalah untuk melahirkan pemimpin daerah yang negarawan yang mengerti persoalan rakyat dan mau bekerja untuk itu. Pilkada adalah sarana untuk menentukan orang terbaik yang mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan berat tersebut dalam tatatan kebijakan publik. Hal ini seharusnya tercermin dalam slogan dan jargon

kampanye serta ide-ide yang diusung oleh para kandidat, yang juga dimengerti oleh Tim Sukses Utama mereka. Namun sayangnya, persoalan-persoalan mendasar pada bidang kesehatan sering terluput.

Salah satu isu strategis yang semestinya menjadi perhatian setiap calon kepala daerah adalah menciptakan masyarakat sehat dan sejahtera. Isu-isu ini seharusnya diangkat bersamaan bersamaan dengan peringatan-peringatan hari nasional yang memang telah menjadi momen untuk itu. Hari ini tanggal 29 Juni, adalah Hari Keluarga Nasional (Harganas) dan Hari Keluarga Berencana Nasional telah luput dari perhatian.

Indonesia akan mengalami "Bonus Demografi" yang mana angkatan usia produktif (15-64 tahun) akan jauh lebih banyak atau berada pada angka 60-70%, dibandingkan dengan penduduk usia muda (kurang dari 14 tahun) dan usia lanjut diatas 65 tahun. Bonus demografi telah dimulai pada periode 2012 hingga 2045, dan akan terjadi dengan puncaknya pada tahun 2030. Jumlah usia produktif yang lebih banyak diyakini akan mampu membawa kemajuan lebih pesat bagi pembangunan Indonesia dari segala dimensi jika mampu direncanakan dan dikelola dengan baik. Akan tetapi, jika jumlah yang banyak ini tidak menjadi perhatian, terutama bagi kepala daerah yang telah kita pilih kemaren, maka "Bonus akan berubah menjadi petaka."

Bonus Demografi Sebagai PR Kepala Daerah

Pekerjaan Rumah yang sudah menanti kepala daerah adalah berperan aktif dalam menciptakan generasi masa depan yang sehat dan kuat. Hal ini dimulai dengan perhatian dan dukungan serius terhadap layanan kesehatan ibu.

Angka kematian Ibu (AKI) secara nasional di Indonesia masih sangat tinggi, yaitu 305 dalam 100.000 kelahiran hidup pada survei antar sensus tahun 2016. Meskipun terdapat variasi antar beberapa daerah, namun tentunya ada beberapa daerah yang justru lebih jelek dari itu. Provinsi Sumbar sendiri, juga menunjukkan angka yang masih memprihatinkan, berada pada angka 212/ 100.000 kelahiran hidup. Harusnya diakui, angka ini mencerminkan layanan pemeriksaan kehamilan dan persalinan belumlah optimal, yang sekaligus mencerminkan layanan kesehatan dasar ibu dan anak belum memenuhi standar kinerja dan kualitas yang diharapkan.

Data AKI, diperkuat oleh hasil Survei Indikator Kesehatan Nasional yang menyebutkan bahwa masih ada 25,3% ibu hamil yang tidak terpantau atau memeriksakan kesehatannya selama kehamilan. Kurang merata dan kurang baiknya layanan kesehatan pada ibu hamil juga tercermin dari masih tingginya angka anemia pada ibu hamil, yaitu